

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017:206) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti explorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis dan secara induktif, membangun data yang parsial kedalam tema, selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan kedalam struktur yang fleksibel.

Menurut Miles dan Huberman (1992:15) data kualitatif berwujud kata-kata bukan merupakan rangkaian angka, yang telah dikumpulkan melalui cara observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman dan selanjutnya di proses melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis.

### **3.2 Lokasi dan Situs Penelitian**

Untuk dapat mengungkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti, maka diperlukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana sebenarnya peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu ciri lokasi, lingkungan serta segala kegiatan yang ada di dalamnya juga akan dapat diketahui dalam lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian yaitu di Kota Surabaya. Situs penelitian yaitu Rumah Produksi Mampu Jaya , Kelurahan Putat Jaya , Kecamatan Sawahan sebagai anggota Program Pahlawan Ekonomi

### **3.3 Sumber Data dan Teknis Pengumpulan Data**

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Menurut Arikunto (2002:107) sumber data dalam penelitian yaitu berupa subyek dari mana saja data diperoleh. Alat yang menjadi sumber informasi adalah benda atau seseorang yang dapat dijadikan narasumber karena lebih dianggap menguasai bidang permasalahan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan mengenai data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara dengan aparat pemerintah yang terkait yaitu Humas Pahlawan Ekonomi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Data sekunder ini tidak secara langsung berhubungan dengan responden. Studi kepustakaan dapat berupa dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, jurnal, arsip-arsip, karya ilmiah yang relevan. Data sekunder di ambil dari rekaman kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan dilakukan kroscek terhadap kebenaran informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan jenis data lain seperti rekaman media massa, artikel.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari responden, dokumen, dan peristiwa yang berkaitan dengan Inovasi Pemerintah tentang usaha mikro kecil dan menengah yang diwujudkan melalui Pahlawan Ekonomi

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi menurut Nazir (2011: 175) merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya bantuan alat standart lain dalam keperluan tersebut. Yang akan diamati dalam proses observasi ini yaitu kondisi lapangan dan obyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menyesuaikan dengan obyek penelitian berdasarkan landasan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan catatan lapangan yang merupakan catatan digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Instrument ini digunakan agar peneliti dapat terhindar dari kesalahan apa yang akan diamati.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2010: 186). Dalam melakukan wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal. Akan tetapi setelah di lapangan peneliti akan mencoba untuk lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang meliputi dokumen atau arsip yang dianggap berhubungan dengan obyek penelitian.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2002: 136) adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah pedoman observasi pedoman wawancara, dan alat dokumentasi.

1. Metode Observasi

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan pedoman pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini :

- a. Mengadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
- b. Menjabarkan faktor menjadi sub atau bagian faktor.
- c. Mencari indikator setiap sub atau bagian faktor.
- d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir pedoman.
- e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar (Suharsimi Arikunto, 2005:135)

2. Metode wawancara

Secara umum, penyusunan pedoman pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini :

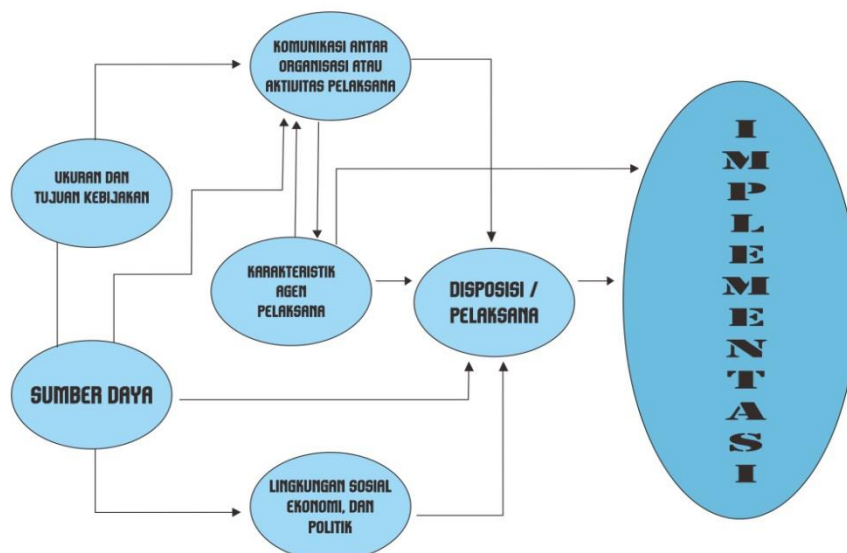
- a. Mengadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
  - b. Menjabarkan faktor menjadi sub atau bagian faktor.
  - c. Mencari indikator setiap sub atau bagian faktor.
  - d. Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir pedoman.
  - e. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar (Suharsimi Arikunto, 2005:135)
3. Dokumentasi
- Peneliti menggunakan alat dokumentasi seperti kamera, perekam sebagai penunjang dalam melakukan penelitian ini.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Analisa data merupakan hal yang penting, karena dengan melakukan analisa data maka data dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan. Analisa data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2017:238) analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lapangan, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain..

Melakukan penelitian kualitatif data dapat diperoleh dengan berbagai macam teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data dapat digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Saat melakukan penelitian kualitatif peneliti ditantang untuk menemukan sendiri metode analisa yang cocok dengan topik yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan model Teori Van Meter Van Horn. Seperti dalam gambar berikut ini :



Gambar 3.1  
*Model A Policy Implementation Process*  
 Sumber: (Agostino, 2006)

Analisis data yang digunakan peneliti selama penelitian dilakukan, memiliki alur kegiatan yang mengambil model Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn isebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975, Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

#### 1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

#### 2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*".

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

### 3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).
2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "*fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.*" (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

### 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

##### 5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam

melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

#### 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap kebenaran yang objektif. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dibedakan menjadi tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dari sumber yang nantinya digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Pahlawan Ekonomi Dalam Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah Putat Jaya Surabaya. Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji kredibilitas data dengan mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.